

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1 Latar Belakang PT. Sepatu Bata Tbk

PT. Sepatu Bata Indonesia Tbk merupakan suatu perusahaan industri manufaktur yang bergerak di bidang per-sepatuan. PT Sepatu Bata Tbk. didirikan di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1931 dengan akta Notaris Adriaan Hendrick van Ophuijsen No.64. Peresmian pengoperasiannya dilakukan pada tahun 1931. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Notaris Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., No.23 tanggal 22 Juni 2009 mengenai perubahan Anggaran Perusahaan untuk Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan terakhir ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No.AHU-60917.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal 14 Desember 2009.

PT Sepatu Bata Tbk. adalah anggota Bata Shoe Organization (BSO) yang mempunyai kantor pusat di Lausanne, Switzerland. BSO merupakan produsen terbesar penghasil sepatu di dunia yang beroperasi di banyak negara, menghasilkan serta menjual jutaan pasang sepatu setiap tahun. Dengan izin ketua Bapepam (sekarang Bapepam-LK) No.SI-010/PM/1982 tanggal 6 Februari 1982. Pada tanggal 24 Maret 1982 saham perusahaan sejumlah 1.200.000 dengan nilai nominal Rp 1.000 (Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1984, Perusahaan telah mengeluarkan 1.920.000 saham

bonus kepada para pemegang saham perusahaan sehingga saham yang ditempatkan dan disetor meningkat dari 8.000.000 saham menjadi 9.920.000 saham. Pada tahun 1986, Perusahaan mengeluarkan 3.080.000 saham bonus kepada para pemegang saham perusahaan sehingga saham yang ditempatkan dan disetor meningkat dari 9.920.000 saham menjadi 13.000.000 saham. Melalui surat PT Bursa Efek Surabaya (sekarang telah dimerger menjadi PT Bursa Efek Indonesia) No. JKT-06/MKT-LIST/BES/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000 dan surat PT Bursa Efek Jakarta (sekarang telah dimerger menjadi PT Bursa Efek Indonesia) No.PENG-191/BEJ-EEM/11-2000 tanggal 8 November 2000, seluruh saham perusahaan yang beredar, yaitu sebanyak 13.000.000 saham, telah dicatatkan di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2000 dan di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 9 November 2000. Pada saat ini 12,3% (dua belas koma tiga persen) dari saham perusahaan yang dimiliki oleh publik.

PT. Sepatu Bata beroperasi di Indonesia sejak tahun 1931. Kegiatannya dimulai di sebuah gudang di Tanjung Priok dengan menjual sepatu-sepatu impor, sedangkan produksinya dimulai di Kalibata, Jakarta dalam tahun 1939. Dan kemudian berkembang pesat. Perkembangan-perkembangan yang pesat ini terhambat oleh Perang Dunia II. Namun setelah perang selesai, pabrik ini diperbaiki dan mulai beroperasi kembali pada tahun 1946. Sejak saat itu, Bata dengan mantap memperkuat kedudukannya sebagai pengusaha sepatu terkemuka di Indonesia.

Pabrik utama dari PT. Sepatu Bata Indonesia, Tbk terletak di Kalibata,

Jakarta Selatan. Dimana pabrik ini memiliki beberapa departemen produksi yang tergantung dari jenis produk yang dihasilkan dan masing-masing departemennya memiliki gedung atau pabrik yang berbeda-beda tapi tetap dalam satu lingkungan yang sama. Dimana departemen tersebut, yaitu *rubber departement, sandals ladies summer shoes departemen, shoes departement, men summer shoes department dan kanvas department*. Setiap departemen melakukan kegiatan manufaktur proses produksi mulai dari bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Dan pada observasi dan pengamatan kali ini, pengamat lebih memfokuskan pada proses yang terjadi pada *men summer shoes department* atau biasa disebut dengan departemen 440/441. Dimana pada *Men Summer Shoes department* ini terbagi atas dua proses pengolahan dan produksi, yaitu proses produksi untuk sepatu tipe *men dressed* dan *moccasin*. Tetapi pada umumnya kedua tipe sepatu ini memiliki langkah proses pengolahan dan produksi yang sejenis, dimana proses tersebut terdiri dari tiga langkah utama, yaitu *manipulating, sewing, dan assembling*.

Kini Bata Indonesia memperkerjakan kurang lebih 1.067 karyawan tetap di pabrik Kalibata, cabang Medan, cabang Surabaya, dan pabrik Purwakarta, serta ribuan lainnya bergantung hidupnya pada perusahaan ini dengan mengusahakan toko pengecer khusus, distributor dalam mendistribusikan produk-produk Bata.

4.1.2 Visi dan Misi PT. Sepatu Bata Tbk

a. Visi Perusahaan

Adapun visi dari perusahaan ini adalah :

”Menjadikan Bata sebagai tempat yang mudah dan menyenangkan untuk berbelanja, mudah dan harganya terjangkau agar mereka berbelanja pada perusahaan ini, dan memberikan kenyamanan berbelanja.”

b. Misi Perusahaan

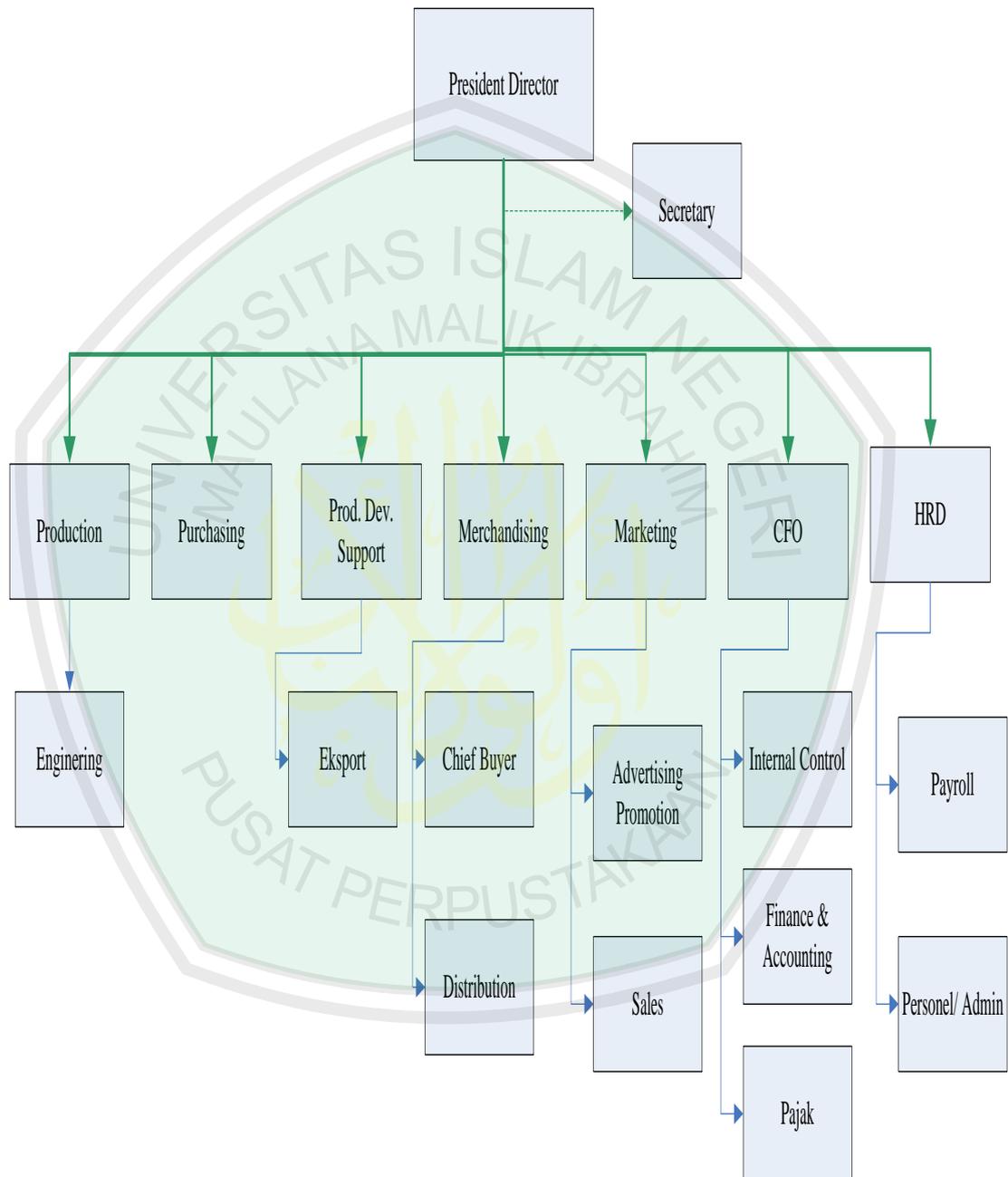
Adapun misi dari perusahaan ini adalah :

“Menjadikan Bata sebagai produk sepatu pilihan utama bagi konsumen dengan cara menawarkan gaya yang memberikan inspirasi kepada konsumen-konsumen yang relevan bagi kehidupan mereka sesuai dengan daya beli mereka.”

4.1.3 Struktur Organisasi PT. Sepatu Bata Tbk

Dalam mencapai visi dan misi yang sudah ditetapkan, maka diperlukan suatu struktur organisasi pada PT. Sepatu Bata Tbk yang efisien dan baik. Struktur organisasi perusahaan menggambarkan suatu hubungan antara fungsi dan posisi bagian-bagian yang ada dalam suatu perusahaan, struktur organisasi merinci pembagian tugas dan tanggung jawab, wewenang dan menunjukkan bagaimana fungsi dan kegiatan yang berbeda tersebut dikoordinasikan dan bekerjasama sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik untuk memudahkan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Berikut adalah struktur organisasi dan pembagian tugas PT. Sepatu Bata Tbk yang datanya di dapat dari web site resmi perusahaan dan annual report perusahaan :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. Sepatu Bata Tbk



Sumber: arsip perusahaan

1. *President Director*

Jabatan ini memiliki fungsi sebagai posisi yang menentukan jalannya perusahaan yang ditinjau dari segala aspek, baik itu menentukan jalannya produksi, pemasaran dan manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini, Presiden Direktur dibantu oleh direktur-direktur lain dari departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut.

2. *Production*

Bagian *Production* merupakan bagian yang merealisasikan seluruh planning dan konsep yang ingin dihasilkan menjadi suatu produk jadi yang akan dikeluarkan ke pasaran. Bagian ini yang bertanggung jawab atas jalannya proses produksi yang harus dihasilkannya dengan memenuhi target estimatonya.

3. *Purchasing*

Bagian ini memiliki fungsi dimana melakukan pembelian dan pemesanan. Pembelian dan pemesanan yang dilakukan bagian *Purchasing* antara lain dalam hal pembelian material. Bagian *Purchasing* yang melakukan pemesanan material yang dibutuhkan untuk keperluan produksi, tentunya pembelian dan pemesanan yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan.

4. *Product Development Support*

Product Development Support sebagai bagian yang berfungsi untuk merancang atau mengembangkan produk yang sudah ada, agar produk produk tersebut tidak monoton dan dapat mengikuti permintaan yang diinginkan pasar. Bagian ini membuat mulai dari konsep sampai dengan prototype produk yang dikembangkan. Setelah itu baru diajukan untuk menjadi produk yang

akan diproduksi.

5. *Marketing*

Marketing merupakan bagian yang menjalankan tugas pemasaran produk-produk yang telah dihasilkan terhadap konsumen. Bagian *Marketing* juga membuat suatu *Production Estimate* yang diberikan ke bagian *Produksi*. Dimana di dalamnya berisi mengenai berapa banyak jumlah produk yang diestimasikan untuk diproduksi.

6. *Financial*

Departemen *Financial* memiliki fungsi sebagai *accounting* perusahaan. Kemudian bagian *Financial* berfungsi sebagai pemegang pengendalian data, baik dalam hal penjualan maupun pembelian.

7. *Human Resources*

Bagian ini merupakan divisi yang berkaitan dengan segala hal mengenai sumber daya manusia didalam pabrik. Baik itu dalam hal perekrutan pegawai baru, *training* pegawai, kesejahteraan pegawai sampai dengan pemberhentian masa kerja pegawai.

8. *Merchandising*

Bagian *Merchandising* memiliki tugas untuk menyerap trend pasar untuk diterapkan ke produksi. Bagian ini juga bertugas untuk membuat *Sales Report*, dimana laporan ini digunakan sebagai dasar pembuatan *planning* ke depan. Dan juga sebagai penyeleksi produk-produk yang akan di jual untuk waktu yang akan datang.

9. *Costing*

Bagian costing memiliki fungsi untuk merincikan jumlah pengeluaran biaya yang dikeluarkan untuk keperluan dalam menghasilkan produk, sebagai contoh biaya-biaya material yang harus dikeluarkan. Dan hal itu semuanya tertuang dalam *Costing Ticket*.

10. *Engginering*, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Bertanggung jawab segala sarana prasarana mesin perusahaan.
 - b. Memperbaiki dan mengoperasikan semua sarana prasarana perusahaan.
11. *Internal Control*, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan audit keuangan perusahaan.
 - b. Melaporkan kepada manajemen bila ada penyimpangan dalam setiap system atau prosedur.
12. *Finance & Accounting*, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. Menjaga kerahasiaan alur dan arus keuangan perusahaan dari semua pihak kecuali atas persetujuan *General Manager*.
 - b. Menjaga dan merawat semua asset milik perusahaan dengan baik.
 - c. Memberikan laporan secara berkala dan *continue* sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mengatur gaji karyawan.
13. *Secretary*, mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Bertanggung jawab atas semua surat-surat baik intern maupun ekstern dan mencatat segala hal yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan.
 - b. Pengarsipan data seperti surat masuk dan surat keluar.
 - c. Mengatur jadwal *General Manager*.

- d. Mewakili General Manager apabila berhalangan hadir.
- e. Mengambil keputusan perekrutan karyawan dan mengadakan rapat dengan klien.

14. Payroll, mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Menerima pembayaran.
- b. Melakukan kontak langsung dengan klien yang berhubungan dengan pembayaran.
- c. Membuat surat tagihan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Laporan Keuangan Perusahaan

Laporan keuangan perusahaan yang disajikan berikut ini adalah laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang terdiri dari Laporan Laba/Rugi dan Neraca yang berhubungan dengan hutang pajak perusahaan Tahun Buku 2011.

Tabel 4.1
PT. Sepatu Bata Tbk
Laporan Laba/ Rugi
Per 31 Desember 2011
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Penjualan:	
Domestik	Rp 644.396.840
Eksport	Rp 34.194.695
Penjualan Netto	Rp 678.591.535
Beban Pokok Penjualan:	
Persediaan Awal	Rp 11.889.089
Pembelian selama tahun berjalan	Rp 146.126.185
Persediaan akhir	Rp (17.991.462)
Bahan baku yang digunakan:	Rp 140.023.812
Tenaga Kerja	Rp 11.976.249
Overheads	Rp 16.936.879
Total Beban Produksi	Rp 168.936.940
Barang dalam proses produksi awal	Rp 2.958.929
Barang dalam proses produksi akhir	Rp (6.691.535)
Beban Pokok Produksi	Rp 165.204.334

Barang jadi awal	Rp 176.369.883
Pembelian selama tahun berjalan	Rp 197.351.368
Barang jadi tersedia untuk dijual	Rp 538.925.585
Barang jadi akhir	Rp (169.314.436)
Total Beban Pokok Penjualan	Rp (369.611.149)
Laba Bruto	Rp 308.980.386
Beban Usaha:	
Penjualan dan Pemasaran:	
Sewa toko	Rp 68.162.858
Pengapalan dan pengangkutan	Rp 16.489.663
Gaji dan upah	Rp 10.078.762
Penyusutan	Rp 11.364.368
Listrik	Rp 7.532.692
Iklan	Rp 8.226.854
Komisi kuasa toko	Rp 6.612.735
Lembur, bonus dan penghargaan	Rp 4.295.057
Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	Rp 3.619.839
Perbaikan dan pemeliharaan	Rp 1.012.588
Beban bank	Rp 1.494.151
Pos, telepon dan komunikasi	Rp 1.402.021
Pajak bumi dan bangunan	Rp 884.872
Konsumsi karyawan	Rp 460.680
Lain-lain	Rp 7.582.273
Total Penjualan dan Pemasaran	Rp 149.219.413
Umum dan Administrasi :	
Gaji dan upah	Rp 16.408.854
Imbalan lisensi merek dagang	Rp 14.797.073
Imbalan jasa teknik dan konsultasi	Rp 11.999.842
Perjalanan, Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	Rp 5.117.460
Lembur, bonus dan penghargaan	Rp 4.437.121
Penyusutan	Rp 3.377.665
Pos, telepon dan komunikasi	Rp 2.932.082
Premi asuransi	Rp 2.641.610
Honorarium komisaris	Rp 1.145.092
Listrik	Rp 1.235.911
Imbalan jasa professional	Rp 1.772.841
Perbaikan dan pemeliharaan	Rp 891.620
Alat-alat tulis dan biaya kantor	Rp 1.240.169
Beban bank	Rp 593.084
Pajak bumi dan bangunan	Rp 400.171
Tambahan/(pembalikan) cadangan penurunan nilai	Rp 39.100
Lain-lain	Rp 2.463.720

Total Umum dan Administrasi	Rp 78.633.256
Total Beban Usaha	Rp (227.852.669)
Laba Usaha	Rp 81.127.717
Pendapatan/ Beban Lain-lain:	
Laba Penjualan Aset Tetap	Rp 409.220
Pendapatan Bunga	Rp 153.030
Beban Keuangan	Rp (2.554.959)
Laba Selisih kurs Netto	Rp 978.682
(Beban)/ Pendapatan lainnya-netto	Rp (1.482.813)
Total Pendapatan/ (beban) lain-lain-netto	Rp (2.496.840)
Laba sebelum pajak penghasilan Badan	Rp 78.630.877
Beban Pajak Penghasilan Badan	Rp (22.284.387)
Laba netto setelah pajak tahun berjalan	Rp 56.346.490
Pendapatan komprehensif lain	Rp -
Total Laba komprehensif setelah pajak tahun berjalan	Rp 56.346.490

Sumber: Data perusahaan.

Kebijakan PT. Sepatu Bata Tbk adalah sebagai berikut:

1. Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan.
2. Pengakuan pendapatan dan beban. Mulai efektif tanggal 1 Januari 2011, Perusahaan menerapkan PSAK No.23 (Revisi 2010). PSAK revisi ini mengidentifikasi terpenuhinya kriteria pengakuan pendapatan, sehingga pendapatan dapat diakui, dan mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu, serta memberikan panduan praktis dalam penerapan kriteria mengenai pengakuan pendapatan. Penerapan PSAK yang direvisi tersebut tidak memberikan pengaruh yang

signifikan terhadap laporan keuangan. Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui sedangkan beban diakui berdasarkan konsep akrual.

3. Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan, diakui sebagai laba atau rugi pada saat terjadinya. Penyusutan aset tetap, kecuali hak atas tanah, dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus, Taksiran masa manfaat untuk tiap-tiap jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Daftar Aktiva Tetap
PT. Sepatu Bata Tbk tahun 2011

Keterangan	Umur Aset
Bangunan	30
Mesin, peralatan dan sarana penunjang toko	10

Kendaraan bermotor	4
Cetakan	2

Ket: data Perusahaan

4.2.2 Analisis Data dan Implementasi *Tax Planning*:

Analisis pengakuan pendapatan dan biaya berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK). Berdasarkan data laporan keuangan PT. Sepatu Bata Tbk untuk tahun 2011 hasil identifikasi atas pendapatan dan biaya menurut PSAK sebagai berikut:

1. Pendapatan yang terdapat pada laporan keuangan PT. Sepatu Bata Tbk adalah yang berasal dari penjualan barang (domestik dan ekspor) dan pendapatan yaitu laba penjualan asset tetap, pendapatan bunga, laba selisih kurs netto.
2. Biaya yang terdapat pada laporan keuangan PT. Sepatu Bata Tbk yaitu :
 - a. Biaya Penjualan dan Pemasaran yang meliputi: iklan, pos, telepon, komunikasi dan lain-lain.
 - b. Biaya umum dan administrasi yang meliputi: biaya gaji, perjalanan, tunjangan kesehatan, jaminan sosial, pos, telepon dan komunikasi, listrik dan lain-lain.

4.2.3 Analisis Pengakuan Pendapatan dan Biaya berdasarkan Undang-undang Perpajakan

Berdasarkan data laporan keuangan pada PT. Sepatu Bata Tbk untuk tahun 2011 ada beberapa perbedaan terhadap pengakuan pendapatan dan biaya menurut PSAK dan Undang-Undang Perpajakan. Perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara PSAK dengan UU Perpajakan akan

mengakibatkan perbedaan antara Laba Komersial dengan Laba secara Fiskal dan dalam penentuan Dasar Pengenaan pajak (DPP) penghasilan harus didasarkan pada Laba Fiskal.

Dalam penyajian laporan keuangan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dengan ketentuan yang ada atau sesuai dengan Peraturan Undang-undang Perpajakan dalam pengakuan pendapatan (Penghasilan) maupun beban. Sehingga diperlukan rekonsiliasi atas laporan keuangan. Perbedaan tersebut terdiri dari 2 macam yaitu:

1. Beda Sementara (*temporary differents*) atau waktu (*time differents*)

Perbedaan sementara atau waktu yaitu selisih jumlah kena pajak yang disebabkan oleh perbedaan waktu yang terjadi apabila item-item dari penghasilan dan biaya yang seharusnya diperhitungkan dalam menentukan besarnya biaya penyusutan, juga menyebabkan besarnya laba kena pajak. Dalam hal ini perusahaan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) dalam menghitung penyusutan atau aktiva tetapnya, sedangkan Undang-undang perpajakan membagi atau menggolongkan aktiva tetap kedalam kelompok-kelompok tertentu. Dalam prinsip akuntansi metode perhitungan besarnya biaya penyusutan disebut prosentase tetap dari nilai buku atau *double declining balance*. Namun untuk kelompok bangunan Undang-undang Perpajakan tahun 2008 menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

2. Beda Tetap (*permanent differents*)

Perbedaan tetap yaitu perbedaan yang terjadi karena adanya perlakuan akuntansi yang berbeda antara PSAK dengan Undang-undang Perpajakan, terdapat pos-pos penghasilan dan biaya yang boleh diakui menurut PSAK tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan atau sebaliknya.

Pos-pos yang termasuk dalam perbedaan tetap dalam laporan keuangan PT.Sepatu Bata Tbk dan pengaruhnya ikut diperhitungkan dalam menentukan laba akuntansi tetapi tidak boleh diakui menurut peraturan perpajakan adalah biaya lain-lain. Biaya lain-lain merupakan biaya yang tidak diakui atau tidak boleh dikurangkan menurut pajak karena biaya lain-lain tersebut tidak dapat menggambarkan secara jelas penggunaannya. Agar dapat diakui sepenuhnya sebagai biaya menurut pajak maka biaya lain-lain ini harus dapat digambarkan secara jelas yang disertai dengan bukti.

4.2.4 Analisis Koreksi Fiskal

Dengan adanya koreksi fiskal wajib pajak diuntungkan karena tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK), dan pada waktu mengisi Surat Pajak Terutang (SPT) tahunan Pajak Penghasilan Badan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu.

Koreksi fiskal pada laporan keuangan PT.Sepatu Bata Tbk nampak sebagai berikut sebelum dilakukan perencanaan pajak:

Tabel 4.3
PT. Sepatu Bata Tbk
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi Komersial ke Fiskal
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Saldo Komersial	Koreksi positif	Koreksi negatif	Saldo fiskal
Penjualan:				
Domestik	644.396.840	-	-	644.396.840
Eksport	34.194.695	-	-	34.194.695
Penjualan Netto	678.591.535			678.591.535
Beban Pokok Penjualan:				
Persediaan Awal	11.889.089	-	-	11.889.089
Pembelian selama tahun berjalan	146.126.185	-	-	146.126.185
Persediaan akhir	(17.991.462)	-	-	(17.991.462)
Bahan baku yang digunakan:	140.023.812			140.023.812
Tenaga Kerja	11.976.249	-	-	11.976.249
Overheads	16.936.879	-	-	16.936.879
Total Beban Produksi	168.936.940			168.936.940
Barang dalam proses produksi awal	2.958.929	-	-	2.958.929
Barang dalam proses produksi akhir	(6.691.535)	-	-	(6.691.535)
Beban Pokok Produksi	165.204.334			165.204.334
Barang jadi awal	176.369.883	-	-	176.369.883
Pembelian selama tahun berjalan	197.351.368	-	-	197.351.368
Barang jadi tersedia untuk dijual	538.925.585			538.925.585
Barang jadi akhir	(169.314.436)	-	-	(169.314.436)
Total Beban Pokok Penjualan	(369.611.149)			(369.611.149)
Laba Bruto	308.980.386			308.980.386
Beban Usaha:				
Penjualan dan Pemasaran:				
Sewa toko	68.162.858	-	-	68.162.858
Pengapalan dan pengangkutan	16.489.663	-	-	16.489.663
Gaji dan upah	10.078.762	-	-	10.078.762

Penyusutan	11.364.368	-	-	11.364.368
Listrik	7.532.692	-	-	7.532.692
Iklan	8.226.854	-	-	8.226.854
Komisi kuasa toko	6.612.735	-	-	6.612.735
Lembur, bonus dan penghargaan	4.295.057	-	-	4.295.057
Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	3.619.839	-	-	3.619.839
Perbaikan dan pemeliharaan	1.012.588	-	-	1.012.588
Beban bank	1.494.151	-	-	1.494.151
Pos, telepon dan komunikasi	1.402.021	-	-	1.402.021
Pajak bumi dan bangunan	884.872	-	-	884.872
Konsumsi karyawan	460.680	460.680	-	-
Lain-lain	7.582.273	7.582.273	-	-
Total Penjualan dan Pemasaran	149.219.413			141.176.460
Umum dan Administrasi :				
Gaji dan upah	16.408.854	-	-	16.408.854
Imbalan lisensi merek dagang	14.797.073	-	-	14.797.073
Imbalan jasa teknik dan konsultasi	11.999.842	-	-	11.999.842
Perjalanan, Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	5.117.460	-	-	5.117.460
Lembur, bonus dan penghargaan	4.437.121	-	-	4.437.121
Penyusutan	3.377.665	-	-	3.377.665
Pos, telepon dan komunikasi	2.932.082	-	-	2.932.082
Premi asuransi	2.641.610	-	-	2.641.610
Honorarium komisaris	1.145.092	-	-	1.145.092
Listrik	1.235.911	-	-	1.235.911
Imbalan jasa profesional	1.772.841	-	-	1.772.841
Perbaikan dan pemeliharaan	891.620	-	-	891.620

Alat-alat tulis dan biaya kantor	1.240.169	-	-	1.240.169
Beban bank	593.084	-	-	593.084
Pajak bumi dan bangunan	400.171	-	-	400.171
Tambahan/(pembalikan)) cadangan penurunan nilai	39.100	-	-	39.100
Lain-lain	2.463.720	2.463.720	-	-
Total Umum dan Administrasi	78.633.256			76.169.536
Total Beban Usaha	(227.852.669)			(217.345.996)
Laba Usaha	81.127.717			91.634.390
Pendapatan/ Beban Lain-lain:				
Laba Penjualan Aset Tetap	409.220	-	-	409.220
Pendapatan Bunga	153.030	-	-	153.030
Beban Keuangan	(2.554.959)	-	-	(2.554.959)
Laba Selisih kurs Netto	978.682	-	-	978.682
(Beban)/ Pendapatan lainnya-netto	(1.482.813)	-	-	(1.482.813)
Total Pendapatan/ (beban) lain-lain-netto	(2.496.840)			(2.496.840)
Laba sebelum pajak penghasilan Badan	78.630.877			89.137.550
Beban Pajak Penghasilan Badan	(20.184.531)			(22.284.387)
Laba netto setelah pajak tahun berjalan	58.446.346			66.853.163
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-
Total Laba komprehensif setelah pajak tahun berjalan	58.446.346			66.853.163

Sumber: data diolah

Tabel 4.4
PT. Sepatu Bata Tbk
Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi setelah Koreksi Fiskal
Periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011
(Disajikan dalam ribuan rupiah kecuali dinyatakan lain)

Penjualan:	
Domestik	644.396.840
Eksport	34.194.695
Penjualan Netto	678.591.535
Beban Pokok Penjualan:	
Persediaan Awal	11.889.089
Pembelian selama tahun berjalan	146.126.185
Persediaan akhir	(17.991.462)
Bahan baku yang digunakan:	140.023.812
Tenaga Kerja	11.976.249
Overheads	16.936.879
Total Beban Produksi	168.936.940
Barang dalam proses produksi awal	2.958.929
Barang dalam proses produksi akhir	(6.691.535)
Beban Pokok Produksi	165.204.334
Barang jadi awal	176.369.883
Pembelian selama tahun berjalan	197.351.368
Barang jadi tersedia untuk dijual	538.925.585
Barang jadi akhir	(169.314.436)
Total Beban Pokok Penjualan	(369.611.149)
Laba Bruto	308.980.386
Beban Usaha:	
Penjualan dan Pemasaran:	
Sewa toko	68.162.858
Pengapalan dan pengangkutan	16.489.663
Gaji dan upah	10.078.762
Penyusutan	11.364.368
Listrik	7.532.692
Iklan	8.226.854
Komisi kuasa toko	6.612.735
Lembur, bonus dan penghargaan	4.295.057
Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	3.619.839
Perbaikan dan pemeliharaan	1.012.588
Beban bank	1.494.151
Pos, telepon dan komunikasi	1.402.021
Pajak bumi dan bangunan	884.872
Konsumsi karyawan	-
Lain-lain	-
Total Penjualan dan Pemasaran	141.176.460

Umum dan Administrasi :	
Gaji dan upah	16.408.854
Imbalan lisensi merek dagang	14.797.073
Imbalan jasa teknik dan konsultasi	11.999.842
Perjalanan, Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	5.117.460
Lembur, bonus dan penghargaan	4.437.121
Penyusutan	3.377.665
Pos, telepon dan komunikasi	2.932.082
Premi asuransi	2.641.610
Honorarium komisaris	1.145.092
Listrik	1.235.911
Imbalan jasa professional	1.772.841
Perbaikan dan pemeliharaan	891.620
Alat-alat tulis dan biaya kantor	1.240.169
Beban bank	593.084
Pajak bumi dan bangunan	400.171
Tambahan/(pembalikan) cadangan penurunan nilai	39.100
Lain-lain	-
Total Umum dan Administrasi	76.169.536
Total Beban Usaha	(217.345.996)
Laba Usaha	91.634.390
Pendapatan/ Beban Lain-lain:	
Laba Penjualan Aset Tetap	409.220
Pendapatan Bunga	153.030
Beban Keuangan	(2.554.959)
Laba Selisih kurs Netto	978.682
(Beban)/ Pendapatan lainnya-netto	(1.482.813)
Total Pendapatan/ (beban) lain-lain-netto	(2.496.840)
Laba sebelum pajak penghasilan Badan	89.137.550
Beban Pajak Penghasilan Badan	(22.284.387)
Laba netto setelah pajak tahun berjalan	66.853.163
Pendapatan komprehensif lain	-
Total Laba komprehensif setelah pajak tahun berjalan	66.853.163

Sumber: data diolah

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan no.36 tahun 2008 pasal 17 mengenai Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tariff pajak. Akibatnya semakin besar penghasilan kena pajak semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Secara umum kondisi perpajakan PT.Sepatu Bata Tbk kurang efisien dikarenakan terdapat komponen-komponen yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai alternatif untuk menghemat pajak penghasilan terutang namun belum digunakan dengan maksimal oleh perusahaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, perusahaan dapat memanfaatkan komponen-komponen yang dapat digunakan untuk menghemat beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. Salah satu cara yang digunakan yaitu memaksimalkan biaya yang diakui secara fiskal dan diakui menurut akuntansi komersial. Perencanaan pajak harus dilakukan dengan cermat dan legal agar tidak terperangkap dengan penggelapan pajak.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PT.Sepatu Bata Tbk maka peneliti akan melakukan perencanaan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau secara legal dan menguntungkan bagi wajib pajak. Berikut ini langkah-langkah perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan, analisa dibagi menjadi 2 alternatif yaitu:

1. Alternatif yang mengurangi pajak
 - 1) Biaya lain-lain.

Dalam koreksi fiskal biaya lain-lain tidak boleh diakui sebagai biaya. Agar biaya lain-lain dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan, maka biaya tersebut harus memiliki informasi yang jelas bahwa biaya memang benar ada biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan perusahaan. Kemudian biaya tersebut harus memiliki bukti yang mencantumkan nominal, tanggal transaksi, dan kepada siapa biaya tersebut diberikan secara otentik.

2) Pertimbangan kenaikan gaji karyawan

Perusahaan yang baik harus memperhatikan kesejahteraan para pegawainya. Dengan menaikkan atau menambah gaji karyawan perusahaan akan memperoleh timbal balik dari karyawan karena dengan naiknya penghasilan maka akan meningkatkan motivasi kerja serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selain itu dengan meningkatkan penghasilan karyawan perusahaan dapat meminimalkan pajak terutangnya salah satunya dengan cara memberikan tunjangan pajak.

3) Pemberian Natura kepada karyawan (biaya konsumsi berupa uang tunai atau tunjangan uang makan)

Biaya konsumsi yang dikeluarkan sebaiknya berbentuk uang tunai bukan berupa kenikmatan atau natura, sehingga boleh dikurangkan sebagai biaya dan memperkecil laba usaha karena secara fiskal diakui sebagai biaya.

2. Alternatif yang Menunda Pembayaran Pajak

1) Biaya Penyusutan

Pada data keuangan perusahaan diketahui bahwa metode penyusutan yang digunakan perusahaan adalah metode garis lurus. Undang-undang perpajakan memperbolehkan menggunakan metode lain dalam menyusutkan asset selain bangunan. Sebaiknya perusahaan menggunakan metode saldo menurun untuk menghitung penyusutan selain bangunan, karena biaya yang diakui perusahaan dapat lebih

besar pada awalnya, meskipun jumlah biaya penyusutan akan sama pada akhirnya, namun biaya yang lebih awal diakui ini dapat membantu perusahaan untuk memperkecil pajak sehingga kas dapat dioperasikan untuk operasional perusahaan.

Contoh perencanaan pajak pada penyusutan PT. Sepatu Bata Tbk jika menggunakan metode saldo menurun adalah sebagai berikut:

$$\text{Masa asset} = \frac{\text{Akumulasi penyusutan}}{\text{Harga perolehan}} \times \text{Umur aset}$$

Tabel 4.5
Perhitungan masa asset tahun 2011

Aset	Harga Perolehan	Akum Penyusutan	Akm. Peny/ HP	Umur asset	Masa Aset	Pembulatan
Bangunan	70.082.958	10.877.841	0,155	30	4,656	5
Mesin, peralatan dan sarana penunjang toko	177.148.208	87.585.554	0,494	10	4,944	5
Kendaraan bermotor	3.721.463	2.531.967	0,680	4	2,721	3
Cetakan	22.105.287	19.454.211	0,880	4	1,760	2

Sumber: data diolah

1. Bangunan

Pada peraturan Perpajakan, satu-satunya yang diwajibkan untuk menghitung penyusutan bangunan dengan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis 20 tahun (secara fiskal) dan tarif 5%. Berikut perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{Penyusutan} &= \text{Harga Perolehan} \times \text{Tarif} \\ &= 70.082.958 \times 5\% \\ &= 3.504.147,9 \end{aligned}$$

2. Mesin, peralatan, dan sarana penunjang toko

Mesin dan peralatan merupakan kelompok Harta Berwujud bukan bangunan Kelompok II menurut Undang-undang pajak dengan umur ekonomis 8 tahun (secara fiskal) tarif 25%. Berikut Perhitungannya:

Tabel 4.6
Perhitungan Mesin, Peralatan, dan Sarana Penunjang took
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Tahun Penyusutan	Tarif	Harga Perolehan	Penyusutan
1	25%	177.148.208	44.287.052
2		132.861.156	33.215.289
3		99.645.867	24.911.467
4		74.734.400,25	18.683.600
5		56.050.800,19	14.012.700
6		42.038.100,14	10.509.525
7		31.528.575,11	7.882.143,8
8		23.646.431,33	23.646.431,33

Sumber: data diolah

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun ke-4 dan ke-5 penyusutan mesin Mesin, Peralatan, dan Sarana Penunjang took adalah sebesar Rp 18.683.600 dan Rp 14.012.700

3. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor merupakan kelompok Harta Berwujud bukan bangunan Kelompok I menurut Undang-undang pajak dengan umur ekonomis 4 tahun (secara fiskal) tarif 50%. Berikut perhitungannya:

Tabel 4.7
Kendaraan Bermotor
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Tahun Penyusutan	Tarif	Harga Perolehan	Penyusutan
1	50%	3.721.463	1.860.731,5
2		1.860.731,5	930.365,75
3		930.365,75	465.182,88
4		465.182,875	465.182,875

Sumber: data diolah

Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa tahun ke-3 dan ke-4 nilai penyusutan kendaraan bermotor adalah sebesar Rp 465.182,88 dan Rp 465.182,875

4. Cetakan

merupakan kelompok Harta Berwujud bukan bangunan Kelompok I menurut Undang-undang pajak dengan umur ekonomis 4 tahun (secara fiskal) tarif 50%. Berikut perhitungannya:

Tabel 4.8
Cetakan
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Tahun Penyusutan	Tarif	Harga Perolehan	Penyusutan
1	50%	22.105.287	11.052.644
2		11.052.643,5	5.526.321,8
3		5.562.321,75	2.763.160,9
4		2.763.160,875	2.763.160,875

Sumber: data diolah

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa pada tahun ke-1 dan ke-2 nilai penyusutan cetakan adalah Rp 11.052.644 dan Rp 5.526.321,8.

Jadi secara rinci penyusutan dengan menggunakan saldo menurun kecuali bangunan tahun 2011 sebagai berikut:

Bangunan	Rp 3.504.147, 9
Mesin, peralatan, dan sarana	Rp 14.012.700
Kendaraan Bermotor	Rp 465.182,88
Cetakan	<u>Rp 5.526.321,8</u> +
Total Penyusutan	Rp 23.508.352,57
Sebelum Perencanaan pajak	<u>Rp 20.292.153</u> -
Selisih	Rp 3.215.199,57

Pemilihan saldo menurun dalam perhitungan penyusutan asset tetap lebih menguntungkan bagi perusahaan dan diperbolehkan menurut Undang-undang perpajakan. Dari hasil analisis metode penyusutan dapat diketahui adanya selisih dari nilai penyusutan sebelum dan sesudah perencanaan pajak, dimana nilai biaya penyusutan setelah perencanaan lebih besar dibandingkan dengan sebelum perencanaan pajak.

Apabila perusahaan telah menggunakan perencanaan pajak dari awal, maka akan lebih banyak pajak yang bisa ditunda. Metode saldo menurun menyebabkan nilai penyusutan lebih besar pada tahun-tahun awal. Meskipun pada akhirnya jumlah biaya penyusutan tetap sama dengan perhitungan menggunakan metode garis lurus, namun dengan adanya selisih tersebut perusahaan dapat memanfaatkannya untuk biaya operasional perusahaannya.

Dari analisis diatas, maka dapat diketahui adanya selisih pengakuan biaya dari sebelum diterapkan perencanaan pajak dengan setelah diterapkan perencanaan pajak. Kemudian perbedaan tersebut akan nampak pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Analisis Penerapan Strategi Perencanaan Pajak
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Jumlah
Laba sebelum pajak	89.137.550
Perencanaan Pajak:	
Biaya konsumsi karyawan (tunai)/ Tunjangan makan	460.680
Biaya penjualan dan pemasaran lain-lain	7.582.273
Biaya Umum dan Administrasi lain-lain	2.463.720
Selisih penyusutan	3.215.199,57
PKP	75.415.677,43
Pajak	(18.853.919,36)
Laba Setelah Pajak	56.561.758,07

Sumber: data diolah

Dengan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu akan lebih memudahkan wajib pajak saat pelaporan pajak karena tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) yang sesuai Undang-undang Perpajakan sehingga pada waktu mengisi Surat Pajak Terutang (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Badan perlu dilakukan koreksi fiskal terlebih dahulu. Berikut ini adalah laporan Laba/Rugi PT.Sepatu Bata Tbk setelah dilakukan perencanaan pajak:

Tabel 4.10
PT.Sepatu Bata Tbk
Periode 31 desember 2011
Laporan Laba rugi setelah dilakukan *tax planning*
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Penjualan:	
Domestik	644.396.840
Eksport	34.194.695
Penjualan Netto	678.591.535
Beban Pokok Penjualan:	
Persediaan Awal	11.889.089
Pembelian selama tahun berjalan	146.126.185
Persediaan akhir	(17.991.462)
Bahan baku yang digunakan:	140.023.812
Tenaga Kerja	11.976.249
Overheads	16.936.879
Total Beban Produksi	168.936.940
Barang dalam proses produksi awal	2.958.929
Barang dalam proses produksi akhir	(6.691.535)
Beban Pokok Produksi	165.204.334
Barang jadi awal	176.369.883
Pembelian selama tahun berjalan	197.351.368
Barang jadi tersedia untuk dijual	538.925.585
Barang jadi akhir	(169.314.436)
Total Beban Pokok Penjualan	(369.611.149)
Laba Bruto	308.980.386

Beban Usaha:	
Penjualan dan Pemasaran:	
Sewa toko	68.162.858
Pengapalan dan pengangkutan	16.489.663
Gaji dan upah	10.078.762
Penyusutan	11.364.368
Listrik	7.532.692
Iklan	8.226.854
Komisi kuasa toko	6.612.735
Lembur, bonus dan penghargaan	4.295.057
Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	3.619.839
Perbaikan dan pemeliharaan	1.012.588
Beban bank	1.494.151
Pos, telepon dan komunikasi	1.402.021
Pajak bumi dan bangunan	884.872
Konsumsi karyawan (tunai)/ tunjangan makan	460.680
Lain-lain	7.582.273
Jumlah Penjualan dan Pemasaran	149.219.413
Umum dan Administrasi :	
Gaji dan upah	16.408.854
Imbalan lisensi merek dagang	14.797.073
Imbalan jasa teknik dan konsultasi	11.999.842
Perjalanan, Tunjangan kesehatan, jaminan sosial tenaga kerja dan beban penghargaan masa kerja	5.117.460
Lembur, bonus dan penghargaan	4.437.121
Penyusutan	3.377.665
Pos, telepon dan komunikasi	2.932.082
Premi asuransi	2.641.610
Honorarium komisaris	1.145.092
Listrik	1.235.911
Imbalan jasa professional	1.772.841
Perbaikan dan pemeliharaan	891.620
Alat-alat tulis dan biaya kantor	1.240.169
Beban bank	593.084
Pajak bumi dan bangunan	400.171
Tambahan/(pembalikan) cadangan penurunan nilai	39.100
Lain-lain	2.463.720
Jumlah Umum dan Administrasi	78.633.256

Total Beban Usaha	(227.852.669)
Laba Usaha	81.127.717
Pendapatan/ Beban Lain-lain:	
Laba Penjualan Aset Tetap	409.220
Pendapatan Bunga	153.030
Beban Keuangan	(2.554.959)
Laba Selisih kurs Netto	978.682
(Beban)/ Pendapatan lainnya-netto	(1.482.813)
Total Pendapatan/ (beban) lain-lain-netto	(2.496.840)
Laba sebelum pajak penghasilan Badan	75.415.677,43
Beban Pajak Penghasilan Badan	(18.853.919)
Laba netto setelah pajak tahun berjalan	56.561.758,07
Pendapatan komprehensif lain	-
Total Laba komprehensif setelah pajak tahun berjalan	56.561.758,07

Sumber: data diolah

Efektivitas beban pajak setelah perencanaan pajak

Dari perhitungan diatas dapat diketahui adanya selisih jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar setelah dilakukannya perencanaan pajak tersebut seperti dibawah ini:

Tabel 4.11
Efektivitas Beban Pajak
Setelah Perencanaan Pajak
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Jumlah
Beban Pajak Sebelum Perencanaan Pajak	22.284.387
Beban Pajak Sesudah Perencanaan Pajak	18.853.919,36
Selisih	3.430.467,64

Sumber: data diolah

Dengan adanya selisih beban pajak membuat adanya selisih penghasilan. Perencanaan pajak yang dilakukan membuat adanya peningkatan laba bersih setelah pajak seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.12
Efektivitas peningkatan laba bersih setelah pajak
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Jumlah
Laba Sebelum Perencanaan Pajak	56.346.490
Laba Sesudah Perencanaan Pajak	56.561.758,07
Selisih	215.268,07

Sumber: data diolah

Dari analisis data yang telah dilakukan diatas dapat diketahui bahwa masih ada komponen yang bisa dimanfaatkan dalam *tax planning* sehingga beban pajak yang harus ditanggung PT.Sepatu Bata Tbk lebih kecil. Dari tabel diatas dapat dibuat selisih beban pajak penghasilan sebelum dilakukan perencanaan pajak perusahaan harus membayar **Rp 22.284.387.000** dan sesudah dilakukan perencanaan pajak perusahaan harus membayar **Rp 18.853.919.360**

Perencanaan pajak yang dilakukan juga bisa meningkatkan laba bersih setelah pajak, dari yang sebelum dilakukan perencanaan pajak **Rp 56.346.490.000** dan sesudah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar **Rp 56.561.758.070**

Sehingga dalam hal ini perusahaan bisa melakukan penghematan pajak (*tax saving*) yaitu sebesar **Rp 3.430.467.640** untuk beban pajak karena adanya perbedaan pengakuan biaya dan penggunaan metode penyusutan dan sebesar **Rp 215.268.070** untuk laba bersih perusahaan setelah adanya *tax planning*. Jadi secara keseluruhan setelah dilakukan perencanaan pajak dapat melakukan penghematan (*tax saving*) sebesar **Rp 3.645.735.710**

4.2.5 Analisis Hubungan Pajak secara Islam

Peneliti setuju dengan adanya pajak di Indonesia karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, subsidi dan pendidikan, dengan pengeluaran seperti

nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat) sebagai berikut:

1. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, disebutkan bahwa meliputi zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Bagi para wajib pajak orang pribadi dan badan yang beragama Islam, pembayaran zakat dan pajak merupakan dua entitas yang paralel sebagai kewajiban keagamaan dan kewajiban selaku warga negara. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat, bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Perencanaan sendiri dalam islam dianjurkan, hal tersebut terdapat dalam al-qur'an: "hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".(Surat AL-Hasyr, ayat 18).

Lalu banyak yang menafsirkan Surat Al-Hasyr ayat 18 tersebut, antara lain: Soejitno Irmin (2005) dalam bukunya Kepemimpinan Melalui Asmaul Husna Menafsirkan atas ayat tersebut bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai perencana semua makhluk ciptaanya, Allah Maha merencanakan, Al-Bari, sifat tersebut jika diamalkan secara substantif seharusnya menjadi inspirasi bagi umat islam terutama para manager atau pemimpin. Karena pada dasarnya manager atau pemimpin yang harus mempunyai banyak konsep tentang manajemen termasuk di dalamnya perencanaan. Pemimpin yang baik adalah yang mempunyai visi dan misi serta membangun kedua hal tersebut membangun kedua hal tersebut agar berjalan sesuai dengan tujuan bersama, visi dan misi merupakan hasil dari perencanaan yang baik dan matang.

Dari penjelasan dan penafsiran tersebut maka implikasi terhadap manajemen akan memberikan pemahaman bahwa proses perencanaan yang baik berlandaskan pendekatan Agama Islam pada surat Al-Hasyr ayat 18 dapat menciptakan proses manajemen yang baik (ideal). Perencanaan dalam manajemen adalah landasan utama untuk mencapai sebuah tujuan yang baik, sehingga perencanaan yang baiklah yang akan menghasilkan tujuan yang baik.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan kemana harus melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan cara efektif dan efisien sehingga perencanaan sesuai yang diinginkan surat al-hasyr (18), mengandung 6 fikiran pokok yaitu:

1. Perencanaan melibatkan proses penetapan keadilan masa depan yang diinginkan.
2. Keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang, sehingga dapat dilihat kesenjangannya.
3. Untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha-usaha.
4. Usaha- usaha tersebut dapat dilakukan dengan berbagai ikhtiar dan alternatif.
5. Perlu alternatif yang baik dalam hal ini mencakup efektifitas dan efisien.
6. Alternatif yang udah dipilih hendaknya diperinci sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan.

Dengan implikasi perencanaan yang benar, maka langkah awal dari sebuah tatanan proses manajemen sudah terumus dan terarah dengan baik. Perumusan dan arah yang benar merupakan bagian yang terbesar jaminan tercapainya tujuan. Dan jika yang diinginkan sesuai target dan sebuah kebaikan, maka kebaikan itulah yang siap digenggam dan dinikmati.

Untuk Analisis Perencanaan pajak dengan memberikan zakat atau sumbangan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk

atau disahkan oleh Pemerintah pada laporan keuangan komersial pengakuannya diakui sebagai biaya/ pengurang penghasilan sedangkan dalam pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Perencanaan Pajak dengan adanya Zakat atau Sumbangan Keagamaan
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Jumlah
Laba sebelum pajak	89.137.550
Perencanaan Pajak:	
Biaya konsumsi karyawan (tunai)/ Tunjangan makan	460.680
Biaya penjualan dan pemasaran lain-lain	7.582.273
Biaya Umum dan Administrasi lain-lain	2.463.720
Selisih penyusutan	3.215.199,57
PKP	75.415.677,43
Zakat/ Sumbangan keagamaan	1.965.771,5
PKP setelah dikurangi Zakat/ Sumbangan keagamaan	73.449.905,93
Pajak	(18.362.476,48)
Laba Setelah Pajak	55.087.429,45

Sumber: data diolah

Tabel 4.14
Efektivitas peningkatan laba bersih setelah pajak
dengan adanya zakat/ sumbangan keagamaan
(Disajikan dalam ribuan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Jumlah
Laba Sebelum Perencanaan Pajak	56.346.490
Zakat	(1.965.771,5)
Total Laba Sebelum Perencanaan Pajak	54.380.718,5
Laba Sesudah Perencanaan Pajak	55.087.429,45
Selisih	706.710,95

Sumber: data diolah

Dari analisis data yang telah dilakukan diatas dapat diketahui bahwa apabila wajib pajak memberikan zakat atau sumbangan keagamaan melalui lembaga resmi, komponen tersebut bisa dimanfaatkan dalam *tax planning* sehingga beban pajak yang harus ditanggung lebih kecil.

Perencanaan pajak yang dilakukan tersebut juga bisa meningkatkan laba bersih setelah pajak, dari yang sebelum dilakukan perencanaan pajak **Rp 54.380.718.500** dan sesudah dilakukan perencanaan pajak menjadi sebesar **Rp 55.087.429,45**

Sehingga dalam hal ini perusahaan bisa melakukan penghematan pajak (*tax saving*) yaitu sebesar **Rp 706.710.950** dengan catatan wajib pajak mengeluarkan zakat atau sumbangan keagamaan kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

4.2.6 Analisis Alternatif Perencanaan Pajak dengan optimalisasi kredit pajak dan pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25

Dalam hal ini perusahaan dapat mengajukan ke kantor pajak dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Kredit Pajak

Untuk menghindari kerugian akibat pajak yang sudah dipotong tidak dapat dikreditkan, maka perusahaan harus :

- a. Selalu menyimpan Surat Setoran Pajak (SSP) dan bukti potong/pungut dengan baik, dan
- b. Jika sudah dipotong/ dipungut oleh pihak lain, segeralah meminta bukti potong/ bukti pungut dan/atau SSP-nya agar terhindar dari kemungkinan kelalaian atau penyalahgunaan pihak lain.

apabila syarat dan ketentuan tersebut terpenuhi bisa diajukan ke kantor pajak sehingga akan mengurangi PPh terutang yang akan dibayar.

2. Pemanfaatan pengurangan angsuran PPh 25

Untuk pengurangan angsuran PPh 25 dapat dilakukan jika perusahaan mengalami perubahan keadaan usaha yang menyebabkan penurunan laba hingga 25% dibandingkan laba fiskal tahun sebelumnya atau mengalami kerugian, maka dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 ke kantor pajak tempat perusahaan terdaftar. Untuk hal ini PT. Sepatu Bata Tbk tidak bisa melakukannya pada tahun 2011 karena laba dari 2010 sebesar 60.975.070.000 sedangkan laba tahun 2011 sebesar Rp 56.346.490.000, hal tersebut tidak sampai mengalami penurunan laba atau kerugian sampai 25%. Apabila perusahaan mengalami penurunan laba fiskal atau kerugian bisa mengajukan hal tersebut ke kantor pajak.